

**TINJAUAN YURIDIS ATAS TANGGUNG JAWAB RUMAH SAKIT DALAM
MELAYANI PASIEN BPJS KESEHATAN DIHUBUNGKAN DENGAN
KETERSEDIAAN DANA YANG DIBERIKAN OLEH PEMERINTAH
DALAM PENANGANAN PASIEN BPJS DITINJAU DARI UNDANG-
UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN JUNCTO
UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG BPJS**

ABSTRAK

Kesehatan adalah hak dasar setiap individu, dan semua warga negara berhak mendapat pelayanan kesehatan termasuk masyarakat miskin. Hak atas kesehatan ini bermakna bahwa pemerintah berkewajiban untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang sehat dan sejahtera. Upaya pemerintah untuk mensejahterakan kehidupan masyarakatnya dibuktikan dengan membentuk Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS). Hal tersebut menjadi bukti kuat bahwa pemerintah memiliki komitmen yang besar dalam mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Namun pada kenyataannya, upaya pemerintah untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang sejahtera belum dapat terpenuhi dengan baik. Hal ini terbukti dengan adanya begitu banyak masalah dalam program BPJS Kesehatan. Hal tersebut terjadi karena menyangkut dengan masalah ketersediaan dana yang diberikan oleh pemerintah dalam penanganan pasien BPJS. Dana yang diturunkan oleh pemerintah untuk pelayanan BPJS kesehatan cenderung minim sehingga menghambat rumah sakit untuk memberikan pelayanan yang maksimal untuk setiap pasien BPJS Kesehatan. Permasalahan mengenai tanggungjawab rumah sakit dalam melayani pasien BPJS Kesehatan merupakan hal yang perlu dikaji.

Metode dalam penelitian ini adalah metode penelitian bersifat yuridis normatif yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma hukum dalam hukum positif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang yang mengacu pada hukum primer berupa Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang SJSN, Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang BPJS. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku, pendapat para ahli dan jurnal-jurnal hukum. Melalui metode penelitian tersebut, maka penulis akan mendapatkan analisa mengenai tanggungjawab rumah sakit dalam melayani pasien BPJS Kesehatan dengan ketersediaan dana yang diberikan oleh pemerintah.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa peranan rumah sakit dalam melayani pasien BPJS Kesehatan dipengaruhi oleh dana yang diturunkan dari pemerintah dan kualitas SDM yang ada pada setiap rumah sakit. SDM tersebut berupa tenaga medis yang terstandarisasi yang dimiliki oleh setiap rumah sakit. Bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan dari pemerintah kepada rumah sakit atas ketersediaan dana yang diberikan oleh BPJS yaitu berupa ganti kerugian terhadap segala kerugian yang ditanggung oleh rumah sakit dalam melayani pasien BPJS Kesehatan.

Kata Kunci: Tanggungjawab, Rumah Sakit, BPJS, Kesehatan, Ketersediaan Dana

**JURIDICAL REVIEW AT THE RESPONSIBILITY OF HOSPITALS
FOR SERVING HEALTH BPJS PATIENTS IN RELATION TO THE
AVAILABILITY OF FUND THAT THE GOVERNMENT PROVIDES
IN HANDLING BPJS PATIENTS AS VIEWED FROM
ACT NUMBER 36 YEARS 2009 ABOUT HEALTH AND
ACT NUMBER 24 YEARS 2011 ABOUT BPJS**

ABSTRACT

Health is a basic right of each individual, and all citizens, including poor ones, have a right of receiving health services. The right of health means that the government is in obligation to realize people's healthy and prosperous life. An attempt of the government to prosper its people's life is by establishing Social Security Implementing Agency (BPJS). It is a strong evidence that the government has a firm commitment to realizing prosperity for the whole people. In fact, however, the government attempt to create people's prosperous life has not been going on well. It is indicated by the numerous problems arising in the Health BPJS program. They are related particularly to the availability of fund that the government provides for handling BPJS patients. The fund allocated by the government for BPJS services inclines to be minimal and it prevent hospitals from providing maximal services to each Health BPJS patient. The problems on the responsibility of hospitals for serving Health BPJS patients are worth studying.

Research method used is juridical normative, which focus on investigating the implementation of legal norms in positive (prevailing) laws. The approach used was a legislation approach referring to primary law in the form of the book of the act Civil Law, act number 40 years 2004 about SJSN, act number 36 years 2009 about Health, act number 44 years 2009 about Hospital, act number 24 years 2011 about BPJS. The secondary legal materials were books, opinion experts, and legal journals. By the research method, the writer obtained an analysis of the responsibility of hospitals in serving Health BPJS patients with the availability of fund from the government.

The research findings concluded that hospitals' role in serving Health BPJS patients was influenced by both the fund allocation and the quality HR of a hospital. The HR includes standardized medical staffs of the hospitals. A form of legal protection that the government may provide to hospitals over the fund availability that BPJS provides is in form of remunerations for all costs that the hospitals incur in serving Health BPJS patients.

Keywords: Responsibility, Hospital, BPJS, Health, Availability of Fund

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul.....	i
Lembar Pernyataan Keaslian.....	ii
Lembar Persetujuan Panitia Ujian.....	iii
Lembar Persetujuan Pembimbing.....	iv
Lembar Persetujuan Revisi.....	v
Abstrak.....	vi
<i>Abstract</i>	vii
Kata Pengantar.....	viii
Daftar Isi.....	xii
Daftar Tabel.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Kegunaan Penelitian.....	12
E. Kerangka Pemikiran.....	13
F. Metode Penelitian.....	18

G. Sistematika Penulisan.....	21
-------------------------------	----

BAB II KEDUDUKAN HUKUM RUMAH SAKIT DAN TANGGUNG JAWAB

RUMAH SAKIT DALAM MELAYANI PASIEN BPJS KESEHATAN

A. Transaksi Terapeutik Yang Melandasi Pelayanan Kesehatan.....	24
---	----

B. Kedudukan Hukum Rumah Sakit Dalam Memberikan Pelayanan Kesehatan

1. Sejarah Penyelenggaraan Rumah Sakit.....	27
2. Definisi Rumah Sakit.....	29
3. Tujuan Pengaturan Rumah Sakit.....	30
4. Tugas dan Fungsi Rumah Sakit.....	33
5. Pengaturan Penyelenggaraan Rumah Sakit.....	35
6. Jenis Rumah Sakit.....	36
7. Klasifikasi Rumah Sakit Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2014.....	38

C. Jenis Pelayanan yang Melandasi Pelayanan Kesehatan

1. Jenis Pelayanan Berdasarkan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.....	43
2. Jenis Pelayanan di Rumah Sakit Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 Tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit.....	45

D. Tanggung Jawab Rumah Sakit Berdasarkan Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit.....	48
BAB III KETERSEDIAAN DANA TERKAIT PROGRAM BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN	
A. Deskripsi Mengenai BPJS Kesehatan.....	53
1. Tugas BPJS Kesehatan.....	56
2. Kewenangan BPJS Kesehatan.....	57
3. Hak BPJS Kesehatan.....	60
4. Kewajiban BPJS Kesehatan.....	61
B. Perbedaan Antara BPJS dan JKN.....	65
C. Alokasi Dana APBN untuk Pelayanan Kesehatan	
1. Tata Penganggaran APBN untuk Pelayanan Kesehatan.....	67
2. Tata Kelola Dana BPJS Kesehatan.....	71
3. Kondisi Praktik BPJS Kesehatan di Rumah Sakit.....	73
4. Kondisi Faktual Pasien BPJS Kesehatan.....	80
BAB IV ANALISA TERHADAP TANGGUNG JAWAB RUMAH SAKIT DALAM MELAYANI PASIEN BPJS KESEHATAN DIHUBUNGKAN DENGAN KETERSEDIAAN DANA YANG DIBERIKAN OLEH PEMERINTAH DALAM PENANGANAN PASIEN BPJS DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN JO. UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG BPJS	

**A. Peran Rumah Sakit dalam Mewujudkan Pelayanan Kesehatan Melalui
Prosedur BPJS Kesehatan**

1. Peran Rumah Sakit dalam Mewujudkan Pelayanan Kesehatan.....	83
2. Bentuk Subrogasi dalam Pelayanan BPJS Kesehatan.....	88
3. Situasi Praktik BPJS Kesehatan di Rumah Sakit.....	93
4. Prosedur Penggunaan Pelayanan BPJS Kesehatan.....	95
5. Permasalahan BPJS Dalam Memberikan Pelayanan Kesehatan.....	99

**B. Perlindungan Hukum Kepada Pihak Rumah Sakit Sebagai Penyedia Jasa
Pelayanan Kesehatan atas Ketersediaan Dana Bagi Peserta BPJS
Kesehatan.....**

102

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	111
B. Saran.....	112

Daftar Pustaka.....	113
----------------------------	------------

Lampiran.....	115
----------------------	------------

DAFTAR TABEL DAN BAGAN

TABEL

1. Perbedaan antara BPJS dan JKN..... 66
2. Perbandingan besaran dana APBN untuk Kesehatan dan BPJS Kesehatan dari Tahun 2013-2016..... 69
3. Dasar upah perhitungan iuran BPJS tahun 2014..... 77

BAGAN

1. Besaran iuran peserta PBI, PPU, PBPU dan BP 79
2. Data Kepesertaan BPJS Kesehatan..... 80
3. Prosedur Pelayanan bagi peserta BPJS Kesehatan..... 98
4. Hubungan kerjasama para pihak dalam BPJS Kesehatan..... 103